

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

# PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PUDJA RACHMAN DIRA

11573105501

KONSENTRASI PERPAJAKAN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**PUDJA RACHMAN DIRA**

**11573105501**

**KONSENTRASI PERPAJAKAN**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : PUDJA RACHMAN DIRA

NIM : 11573105501

JURUSAN : AKUNTANSI S1

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP,  
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA  
PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH**

PEMBIMBING



**KHAIRIL HENRY, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19751129 200801 1 009

**MENGETAHUI**

DEKAN



**Dr. Drs. H. MUH. SAID HM., M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN



**NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak, Ca**  
NIP. 19780808 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PUDJA RACHMAN DIRA  
NIM : 11573105501  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI SI  
JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN  
NPWP, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA PEKANBARU  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019


**PANITIA PENGUJI**

**KETUA PENGUJI**

Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak.CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

  
Hji. Elisanovi, SE, MM, Ak. CA  
NIP. 19680823 201411 2 001

**PENGUJI II**

  
Identiti, SE, M.Ak  
NIP. 19690623 200901 2 004

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU**

OLEH:

**PUDJA RACHMAN DIRA**

**11573105501**

Penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak Madya Pekanbaru yang berlangsung pada bulan Januari 2019 sampai selesai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutangnya. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan menggunakan instrument kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Untuk mengetahui besarnya hubungan variable independen terhadap variable dependen digunakan analisis Regresi Analisis Linier Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil penelitian bahwa pemahaman akuntansi diperoleh  $t$  hitung sebesar 2,084, kepemilikan NPWP diperoleh  $t$  hitung 2,644 dan pemeriksaan pajak diperoleh  $t$  hitung sebesar 3.666. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan secara simultan ketiga variabel pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dapat dilihat dari hasil SPSS  $F$  hitung sebesar 18,590 >  $f$  tabel 2,711. Dan dari hasil pengolahan data diperoleh  $r$  sebesar 0.393 artinya 39,3%, sedangkan sisanya sebesar 60,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru”. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada saat selesainya pembuatan laporan ini penulis menyadari dan memahami bahwa laporan yang penulis buat ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kejanggalan- kejanggalan dalam penulisan laporan ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada penulis terutama ditujukan kepada:

1. Teristiewa untuk Ibunda tercinta Ir. Daryanti dan Ayahanda tercinta Abdul Rahim, SH, MKn yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras, dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita- cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita. Sungguh mulia pengorbananmu,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fakultas dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Akmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Nasrullah Jamil, SE, M.Si, Ak,CA selaku ketua jurusan program S1 Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di program S1 Akuntansi Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya dan memberikan arahan yang tak henti- hentinya kepada penulis.
7. Bapak Idris selaku Pimpinan Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Beserta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan laporan penulis kerjakan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademis dan Umum Fekonsos Uin Suska Riau
9. Kepada Sahabat penulis Nurul Nafisah, SE yang telah membantu penulis dalam mencari buku dan referensi untuk penelitian.
10. Rekan-rekan S1 Akuntansi Khususnya lokal H Akuntansi dan Perpajakan C angkatan 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap seluruh kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Pekanbaru, 20 November 2019

Penulis

Pudja Rachman Dira

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pajak .....	13
2.2 Pengertian Pemahaman Akuntansi .....	14
2.2.1 Konsep Pemahaman Akuntansi .....	15
2.2.2 Indikator Pemahaman Akuntansi .....	16
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	17
2.3.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP .....	18
2.3.2 Fungsi NPWP .....	20
2.3.3 Format NPWP .....	20
2.3.4 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri .....	21
2.4 Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	24
2.5 Pajak dalam Perspektif Islam .....	28
2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syariat .....	29
2.5.2 Pajak Sebagai Ibadah .....	29
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
2.7 Penelitian Terdahulu .....	33
2.8 Model Penelitian .....	35
2.9 Pengembangan .....	36
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	39
3.1 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4 Populasi dan Sampel .....	40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.1 Populasi .....	40
3.4.2 Sampel .....	40
3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	41
3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....	41
3.5.2 Pemahaman Akuntansi .....	41
3.5.3 Kepemilikan NPWP .....	43
3.5.4 Pemeriksaan Pajak .....	43
3.6 Metode Analisis Data .....	44
3.7 Uji Kualitas Data .....	44
3.7.1 Uji Validitas .....	44
3.7.2 Uji Reliabilitas .....	45
3.8 Uji Asumsi Klasik .....	45
3.8.1 Uji Normalitas Data .....	45
3.8.2 Uji Multikolinearitas .....	46
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas .....	46
3.9 Uji Hipotesis .....	46
3.9.1 Uji Regresi Berganda .....	46
3.9.2 Uji Parsial T .....	47
3.9.3 Uji Simultan F .....	48
3.9.4 Koefisien Determinasi R <sup>2</sup> .....	48

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Responden .....	49
4.2 Uji Kualitas Data .....	50
4.2.1 Uji Validitas .....	50
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	54
4.3 Statistik Deskriptif .....	54
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	56
4.4.1 Uji Normalitas .....	56
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.4.3 Uji Multikolinearitas .....	58
4.5 Uji Hipotesis .....	59
4.5.1 Regresi Linier Berganda .....	59
4.5.2 Uji Parsial T .....	61
4.5.3 Uji Simultan F .....	63
4.6.4 Koefisien Dterminasi .....	64
4.6 Pembahasan .....	66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

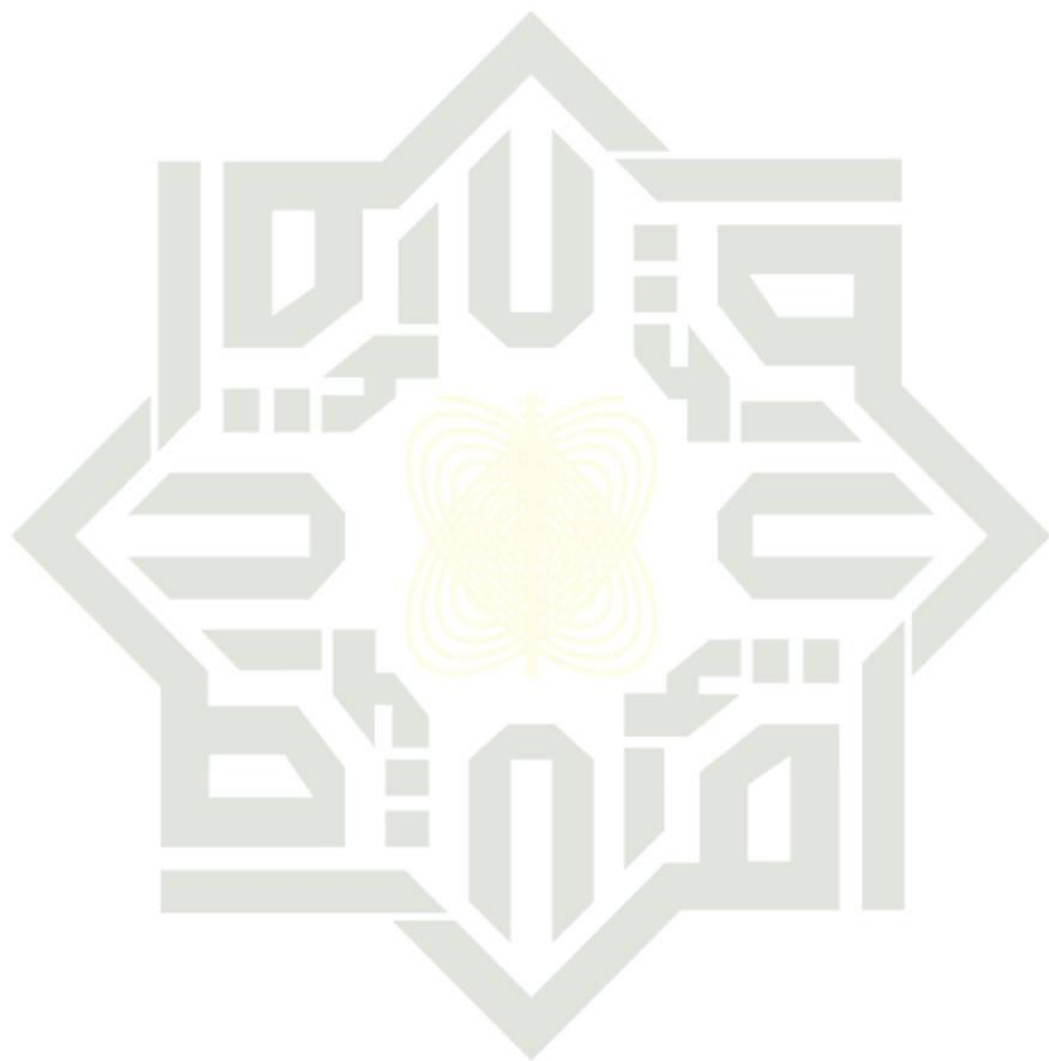
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu .....	33
4.1	Tingkat pengembalian Kuisisioner .....	49
4.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	50
4.3	Rekapitulasi Uji Validitas Pemahaman Akuntansi .....	51
4.4	Rekapitulasi Uji Validitas Kepemilikan NPWP .....	52
4.5	Rekapitulasi Uji Validitas Pemeriksaan Pajak.....	52
4.6	Rekapitulasi Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	53
4.7	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas .....	54
4.8	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
4.9	Hasil Uji Normalitas .....	56
4.10	Hasil Uji Multikolinieitas.....	58
4.11	Hasil Perhitungan Regresi Berganda .....	59
4.12	Hasil Uji Hipotesis Parsial .....	62
4.13	Hasil Uji Hipotesis Simultan.....	64
4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	65

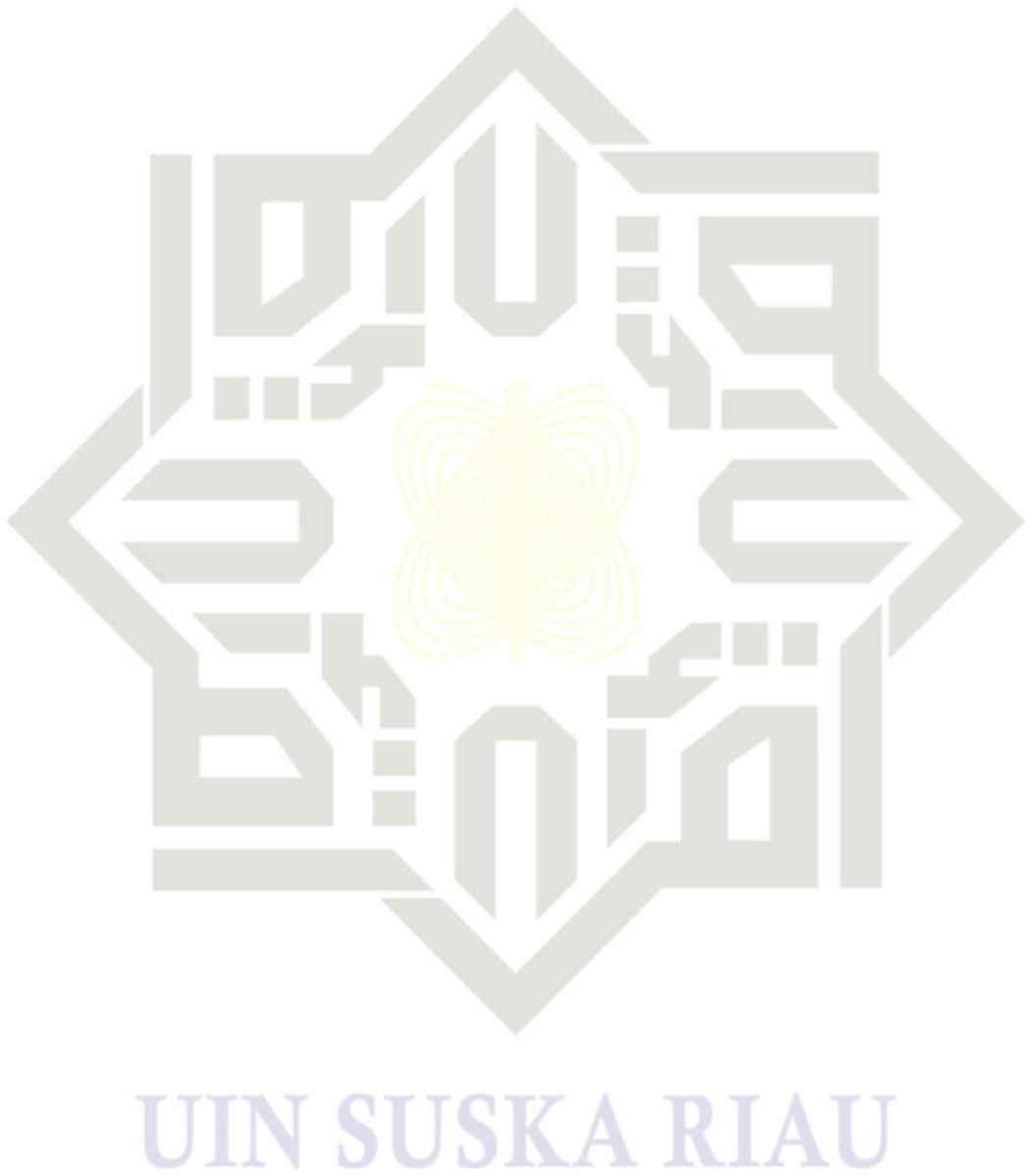


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	35
Gambar 4.1 Diagram Scetterplot Heterokedastisitas .....	57



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Kontribusi pajak terhadap suatu pembangunan telah menyamakan atau bahkan lebih besar dari sektor yang lainnya seperti minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Pada saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan diberbagai bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Oleh karenanya sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan Tax Reform/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Pajak baru dengan diberlakukannya Self Assessment System. Oleh karenanya dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata



tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku. Yaitu suatu sistem “Self Assessment System”, yang tidak jauh dengan sekarang yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo, (2009).

Hingga periode 2015 sampai 2016, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktur Jenderal pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi Non karyawan, dan 22.332.086 WP OP karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan karena menurut data Badan Pusat Statistic (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Yang artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan penghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kemudian dari total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, perusahaan cabang, WP OP yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT tahunan PPh hanya 8.159.840 WP wajib SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut data Direktur Dirjen Jenderal Pajak adapun jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non karyawan, dan 9.431.934 WP OP karyawan. Artinya, tingkat atau rasio

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan Wajib Pajak badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-karyawan 40,75% dan Wajib Pajak karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172,018 WP bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non karyawan, dan 181.537 WP OP karyawan.

Pemahaman tentang akuntansi dalam perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, Wajib Pajak yang memiliki usaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para Wajib Pajak tersebut mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan baik dan benar.

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dibandingkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat menyebabkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda Ade nisa, (2009).

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan hukum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak Saepudin, (2012). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif.

Seperti kasus Direktur disebuah perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya di Semarang yang dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindakan pidana perpajakan. Terdakwa bernama Soetijono menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Soetijono terbukti melakukan tindakan pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf c pasal 43 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan hokum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU RI nomor 16 tahun 2000. Perbuatanya merugikan Negara sebesar 5,8 miliar. Adithya, (2016).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supadmi, (2009) berpendapat bahwa dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mendaftar diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatar belakangi oleh berbagai manfaat Wajib Pajak atas NPWP tersebut. Priantara, (2010) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Bahwa Wajib Pajak akan patuh untuk mendaftar diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Setelah Wajib Pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat

Federal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan Wajib Pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi Wajib Pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

*Sistem Self Assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan *Sistem Self Assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self Assessment System yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang mana Wajib Pajak tersebut akan melakukan kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian Negara.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan kesulitan untuk menilai Kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan adalah pegawai Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yunita Eriyanti Pakpahan tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan (2015) yang akan berbeda dengan penelitian terdahulu dalam beberapa hal, yaitu obyek penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan perpajakannya di KPP Madya Pekanbaru. Alat uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Diharapkan penelitian ini akan mampu menjawab pertanyaan apakah pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak peranan yang sangat penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan pajaknya.

Akhimya penulis memberikan judul penelitian ini **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Pekanbaru?
2. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Pekanbaru?
3. Apakah dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Pekanbaru?
4. Apakah pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Madya Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru .
2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru .
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Madya Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

#### Manfaat bagi peneliti

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

#### 2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

- a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak

#### 3. Manfaat Bagi Pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut ini :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian-uraian teoritis yang ada hubungannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis penelitian.

#### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, perumusan model penelitian, dan analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan penulis atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Disamping itu disertakan beberapa keterbatasan dari penelitian ini serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Ick, Amin (2014:2) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun menurut Simanjuntak, (2012:11) adalah kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara berdasar undang undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik).

Menurut Soemitro, (2010:25) pengertian pajak adalah sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama,



berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

## 2.2 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Adapun pengertian pemahaman akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut pendapat Johar, (2008:12) Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut Hidayat, (2013:68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rulyanti, (2008) mengungkapkan bahwa: “setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya, pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan benar bagi badan usaha. Sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui jumlah besaran pajak terutangnya.

### 2.1 Konsep Pemahaman Akuntansi

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode penyusutan
2. Penerapan metode

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal II Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan:

1. Metode garis lurus (straight line methode) atau metode saldo menurun (decline balance methode) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penerapan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuan, Wajib Pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya yaitu rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau First In First Out (FIFO) dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya (Pasal 28 ayat (5) UU PPh).

Ketika Wajib Pajak dihadapkan kepada satu kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan harus dilampiri atau dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

#### 2.2.2 Indikator Pemahaman Akuntansi

Menurut Agoes, (2007:218) indikator Pemahaman akuntansi pajak adalah

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP (Ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan)
2. Memahami koreksi fiskal.
3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan

Adapun Penjelasan indikator pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar accrual basis atau cash basis yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.
2. Dalam koreksi flskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.
3. Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap tak berwujud menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun.

#### 2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Mardiasmo, (20011:23).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Resmi (2009:26), nomor pokok Wajib Pajak merupakan suatu Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Pengertian nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Waluyo (2009:24) adalah : “nomor yang diberikan Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perjakanya”.

Semua Wajib Pajak yang telah melakukan persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *Sistem Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahanya Diana dan Setiawati (2011:4)

#### 2.3.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib Pajak mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan formulir permohonan pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta di tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Wajib Pajak. Jika permohonan di tanda tangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain mengisi formulir pendaftaran, Wajib Pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut Tansuria (2010:3):

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
2. Untuk Wajib Pajak Badan
  - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
  - b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
  - c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong.
  - a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
  - b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
4. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
  - a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation.
  - b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
  - c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

### 2.3.2 Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo, (2011:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

### 2.3.3 Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak yang mengindikasikan apakah Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang Pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikutnya Tansuria, (2010:1):

- |           |   |
|-----------|---|
| 08        | : Identitas Wajib Pajak orang pribadi   |
| 516.767   | : Nomor urut/nomor registrasi   |
| 0-823.000 | : Cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP) |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Kode KPP

: Kode pusat/suami atau cabang/istri

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap Wajib Pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

#### 23.4 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor 28 tahun 2007, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  - b. Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak.
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(11);atau.
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1a) menjelaskan bahwa:

1. Pasal 21 ayat (5a)

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalance hubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, bendaharawan) dan peketja (karyawan, PNS) akan sama sama dirugikan kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena mekanisme pembayaran pajak Pasal 21 bagi swasta biasanya ditanggung oleh pemberi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja, sedangkan bagi PNS, khusus denda Pasal 21 akibat tidak punya NPWP, pajaknya akan ditanggung oleh PNS itu sendiri.

#### 2. Pasal 22 ayat (3)

Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemungut PPh pasal 22 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

#### 3. Pasal 23 ayat (1a)

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 23 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

### 2.4 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Asas perpajakan Indonesia menganut *Self-Assessment*, tetapi pemerintah melalui pemeriksaan pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut Waluyo, (2012:370), mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

keajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Suandy, (2011:203) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut, “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk memberikan dasar hukum dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak dalam menghadapi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 /PMK 03/2011. Ketentuan baru mengenai pemeriksaan pajak ini berlaku sejak 3 Mei 2011. Hal penting dalam perubahan peraturan ini adalah hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampiran nya. Batas waktu tanggapan tertulis dari Wajib Pajak atas SPHP menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima oleh Wajib Pajak Perpanjangan jangka waktu penyimpanan tanggapan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu berakhir. Selain itu, dalam rangka pembahasan akhir Wajib Pajak harus diberikan undangan tertulis yang berisi hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sehingga kepatuhan pajak akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang menegaskan bahwa: “ Pemeriksaan Wajib Pajak yang melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun ke tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### a. Jenis pemeriksaan pajak

Berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor SE 10/PJ.04/2009 tanggal 31 desember 2008 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, terdapat 2 ( dua) jenis pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang KUP
2. Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang selanjutnya disebutkan dengan pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak.

#### Ruang lingkup pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakup dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan . Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik satu atau beberapa Masa Pajak , Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-IO/PJ.O4/2008 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas , tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 4 (empat ) bulan dan dapat diperpanjang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi 8 ( delapan ) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 ( enam ) bula yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

### 2.5 Pajak dalam Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah : 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan



dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya.

### 2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dhariba, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal ft Daulah al-Khilafah* berpendapat: *“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta”*.

Dalam definisi tersebut terangkum 5 (lima) unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu: Diwajibkan oleh Allah SWT, objeknya adalah harta (al-Mal), subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyum*), tujuannya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja, dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

### 2.5.2 Pajak Sebagai Ibadah

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa saja yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS.Al-Zalzalah 99:7) :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Pembayaran pajak dapat juga dibenarkan dalam syari'at Islam karena memiliki beberapa konsideran:

1. Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesama umat manusia merupakan kewajiban. Allah berfirman dalam surat Almaidah ayat 2, artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".
2. Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas.
3. Kaidah-kaidah Umum Hukum Syara', diantaranya Maslahah Mursalah.
4. Kebutuhan untuk biaya jihad dengan segala kaitannya.

Kerugian dibayar dengan keuntungan, yaitu ketika umat Islam membayar pajak, dia dapat merasakan hasil pajak tersebut lewat pembangunan dan keamanan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan Khairiah, (2009).

Kepatuhan pajak menurut *International Taxes Glossary* adalah tingkatan yang menunjukkan Wajib Pajak patuh/ tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya serta mengemukakan bahwa kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi intensitas atau tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan Khairiah, (2009 ).

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor 544/KMK.O4/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria Wajib Pajak patuh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah Undang-undang No.16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan KMK No.554/KMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh. Adapun kriteria Wajib Pajak patuh yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran;
3. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah;
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir Fidel, (2010: 53-54).

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah besar, karena pembayaran pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih



memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pajaknya Rusjdi, (2008).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Yunita Eriyanti Pakpahan (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi , ketentuan perpajakan dan transparasi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan	Bahwasanya pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparasi dalam pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Ade Saepudin (2013)	Pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparasi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan ( survey pada wajib pajak badan Pph Berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya)	Bahwasanya pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparasi dalam pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Masruroh ( 2013)	Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak dan pemeriksaan pajak OP di kabupaten tegal	Pengaruh kemanfaatan NPWP. Pemahaman wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak OP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Sumianto (2015)	Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparasi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Bahwasanya pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparasi dalam pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Satri Pamber( 2016)	Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak	Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan



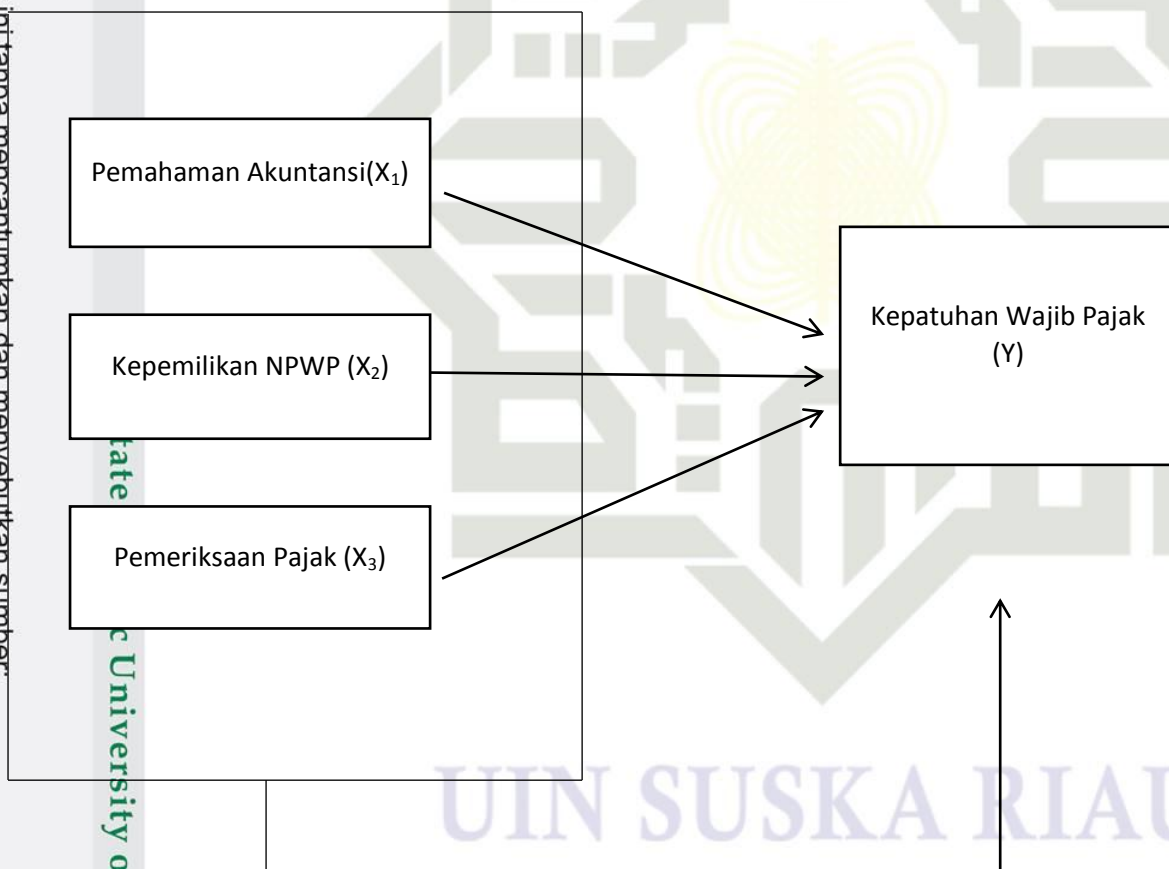
## 2.3 Model Penelitian

Didasari oleh uraian-uraian diatas terutama mengenai pentingnya kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertatik melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Pekanbaru

**Gambar 2.1**

Variable Indepen

Variabel Dependen



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Pengembangan

Hipotesis penelitian ini berkenaan dengan penelitian yang kita ajukan untuk memprediksi kemungkinan yang juga merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang kita ajukan Budi, (2015: 18).

### 1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Waluyo, (2012) Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. Wajib Pajak diwajibkan membuat pencatatan/pembukuan guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H1: Diduga pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

### 2. Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh, (2013) tentang pengaruh kepemilikan NPWP, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya kepemilikan NPWP itu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H2: Diduga kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

### 3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Rahayu menjelaskan bahwasanya analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan di jenjang pajak yang cukup ketat dan tegas.

Dalam uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**H3: Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

### 4. Pengaruh pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Dengan pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) menyatakan pengaruh pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perpajakan akuntansi tidak dapat dikesampingkan, oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami pemahaman akuntansi agar dapat menyampaikan SPT dengan benar. Teori diatas didukung oleh penelitian Ade Saepudin (2013) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap

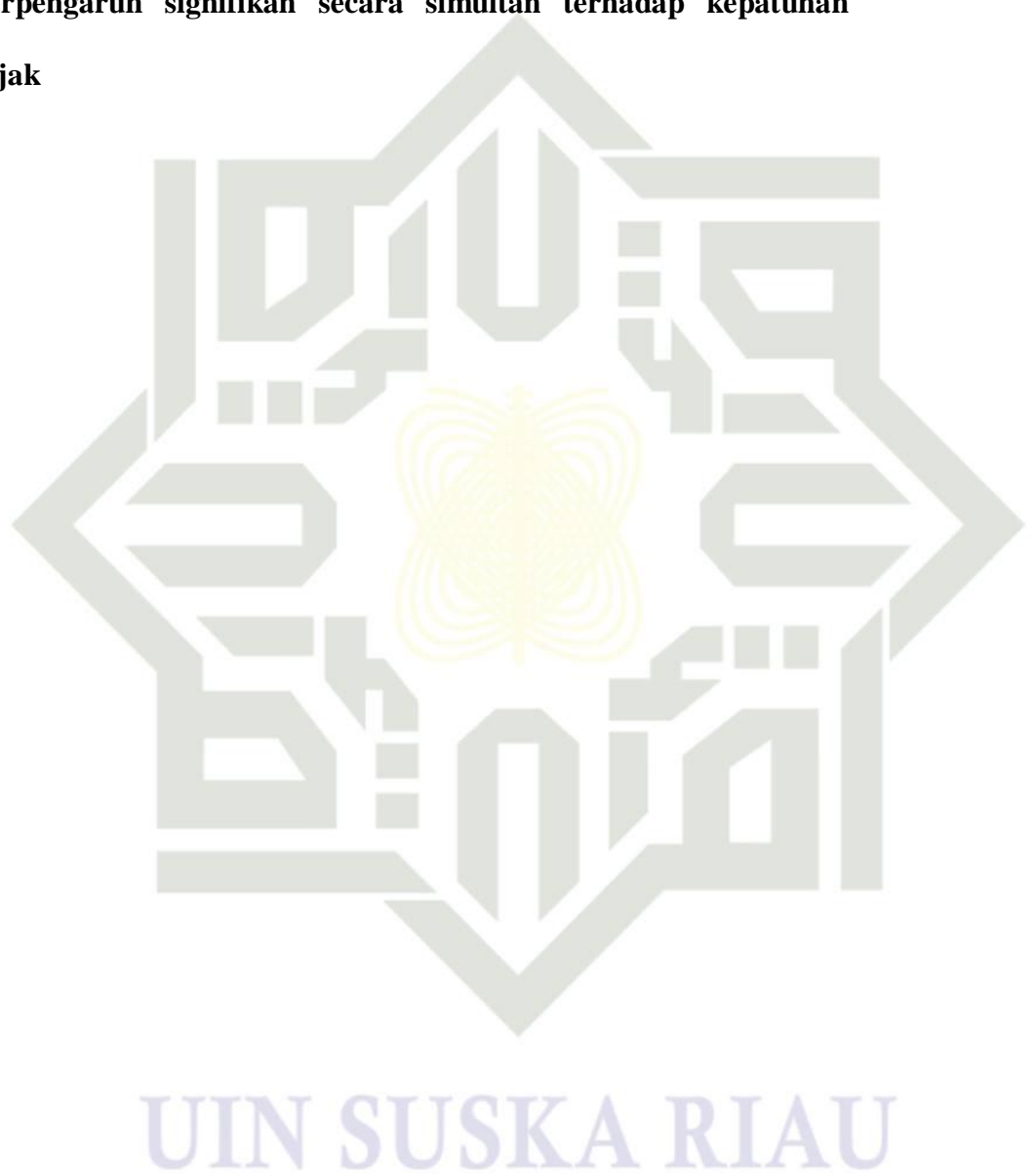


kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H4: Diduga Pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Pada dasarnya dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat eksplantasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi Sugiyono, (2010).

Berdasarkan tingkat eksplantasi dan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kuisioner yang diberikan berupa pertanyaan yang akan diberi nilai.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru yang terletak di Jalan SM Amin Arengka II Pekanbaru Riau 28293

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pengamatan langsung atau *Observation* yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kuesioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

### 3.4 Populasi dan sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. Sugiyono, (2010:90).

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru sebanyak 891 Wajib Pajak.

#### 3.4.2 Sampel

Sugiyono, (2010:62), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) adapun jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru sebanyak 891 Wajib Pajak. Pengambilan sampel dilakukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode *convenience sampling* dengan penelitian jumlah sampelnya menggunakan rumus *slovin* dalam (Husein Umar:2008) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dalam hal ini:

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{891}{1 + 891 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{891}{1 + 8,91}$$

$$n = \frac{891}{9,91}$$

$$n = 90$$

### 3.5 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu:

#### 3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan besarnya pajak terutang tepat pada waktunya, mengisi dengan benar jumlah pajak yang

terutang dan membayar pajak tepat waktu. Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak pada waktunya. Variable ini diukur dengan 5 pertanyaan. Setiap responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Eriyanti (2015)

### 3.5.2 Pemahaman Akuntansi (X1)

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena dalam proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. Menurut pendapat Johar (2008:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

Indikator pemahaman akuntansi yaitu pencatatan transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, dan penafsiran data keuangan. Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan. Setiap responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Eriyanti (2015)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5.3 Kepemilikan NPWP (X2)

Kepemilikan NPWP sebenarnya diperlukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan pajak terutang. Selain itu NPWP digunakan sebagai alat penanda bahwasan seseorang tersebut sudah termasuk Wajib Pajak yang harus melaporkan pajaknya dengan benar, Sukrisno (2007).

Manfaat kepemilikan NPWP adalah dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak, memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan memudahkan ketertiban dalam pembayaran pajak.

Indikator kepemilikan NPWP dalam penelitian ini yaitu sebagai identitas Wajib Pajak, transaksi pembayaran pajak, dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Variable ini diukur dengan 5 pertanyaan. Setiap responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Satria Pamber (2016)

### 3.5.4 Pemeriksaan Pajak (X3)

Penanganan pemeriksaan di bidang perpajakan menurut Mardiasmo, (2011:36) adalah: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan pajak”.

Indikator dalam pemeriksaan pajak adalah adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan, petugas menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, pemeriksaan meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada Wajib Pajak yang akan di periksa, pemeriksaan diakhiri pertanggung jawaban



dengan menyusun laporan pemeriksaan. Variable ini diukur dengan 5 pertanyaan. Setiap responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Satria Pamber (2016)

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh variable independen dan variable dependen. Didalam pengujianya akan dilakukan dengan bantuan program *SPSS*.

### 3.7 Uji Kualitas Data

#### 3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Imam Ghozali (2013:53). Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa seharusnya diukur. Penentuan validitas data menggunakan korelasi *Pearson* Indrianto dan Supomo (2009:179-180). Sebelum dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian data terhadap variabel tersebut. Uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuisisioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, dengan kata lain sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukumya.



Uji validitas digunakan memilih item-item pertanyaan yang relevan untuk analisis.

### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan handal (*reliabel*) jika memiliki koefisien *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013:47).

### 3.8 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

#### 3.8.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov test* yaitu jika signifikannya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.8.2. Uji Multikolonearitas

Uji Multikolonearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali: 2013:105). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolonearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonearitas pada penelitian tersebut.

### 3.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.9 Uji Hipotesis

### 3.9.1 Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Model ini digunakan untuk menguji apakah terdapat



hubungan sebab akibat antara kedua variable. Adapun persamaanya sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Variabel Pemahaman Akuntansi

X<sub>2</sub> = Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP

X<sub>3</sub> = Variabel Pemeriksaan Pajak

b = Koefisien Regresi

e = Error

### 3.9.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016:101). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig. < 0,05, maka hipotesis diterima (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai sig.  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

#### 3.9.3 Uji Simultan (uji F).

Uji secara simultan (F-Test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Jika nilai signifikan F lebih besar dari  $\alpha 0,05$ , maka variabel independen terdapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

#### 3.9.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin paham wajib pajak dengan akuntansi, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan dengan memahami akuntansi wajib pajak akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangannya sehingga wajib pajak dapat menentukan jumlah kewajiban pajaknya secara tepat.
2. Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hasil ini menjelaskan bahwa, wajib pajak yang memiliki NPWP akan cenderung patuh melakukan pembayaran pajak, karena nomor wajib pajak yang terdaftar akan diawasi oleh pihak perpajakan dalam kepatuhannya dalam membayar pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hasil ini menjelaskan bahwa, jika kantor perpajakan sering melakukan pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkatnya juga, hal ini dikarenakan jika wajib pajak sering diperiksa mengenai pembayaran pajaknya maka wajib pajak akan ada kekhawatiran jika tidak melakukan pembayaran pajaknya.
4. Pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.
5. Hasil koefisien determinasi menjelaskan persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 39,3% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya, 60,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi KPP

Untuk KPP dapat melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang sudah lama berhutang pajak atau kepada wajib pajak yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak. KPP juga harus melakukan sosialisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai manfaat kepemilikan NPWP dan pemahaman akuntansi terkait penyusunan perpajakan, agar wajib pajak dapat merasakan dampak dari pembayaran pajaknya.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 39,3% yang artinya sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Masih ada tersisa 60,7% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, pemahaman pajak, dll.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran surah At-Taubah: 29
- Al-Quran surah Al-Zalzalah: 99
- Ade nisa, 2009. *Pemahaman dalam akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan*
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba empat, Jakarta
- Anastasia Diana, Lilis Setiaati, 2011. *Sistem informasi akuntansi*, Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Herman Darmawan. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Diaz Printara, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2, Mitra Wacana Media: Jakarta
- Dwi Priyanto, 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis data penelitian dengan SPSS dan Tanya jawab pendadaran*. Gaya Media : Yogyakarta
- Fidel, 2010. *Cara mudah dan Praktis memahami masalah-masalah perpajakan*, PT Raja Grafindo: Jakarta
- Ghazali,I. 2008. *Aplikasi analisi multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, Icu, Ranga B. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Hasibuan, 2010. Pengaruh pemahaman akuntansi dan transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Johar, Arifin. 2008. *Statistik Terapan dengan Microsoft Exel 2007*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Khairiah, rini. 2009. Analisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kec Guguk. UNAND Padang
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi : Yogyakarta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh, Zain. 2008 *"Manajemen Perpajakan"*. Salemba Empat : Jakarta
- Muhammad Rusjdi, 2008. *Bphtb dan Bea Meterai Edisi Kedua*, PT Mancana Jaya Cemerlang: Jakarta
- Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak, Menghindari dan Menghadapi*: PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat: Jakarta
- Rulyanti, Susi 2008. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrative*. Jakarta: Alfabeta
- Supadmi, 2009. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Simanjuntak. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses
- Saepudin. 2012. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Siti Masruroh. 2013. *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Soemitro dan Supramono, 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Standly, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Tansuria, Billy Ivan. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*.
- Tianto, Budi. 2015. *Riset Modeling*. Pekanbaru: ADH DHUHA INSTITUTE.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Wriyanti, Yunita. 2015. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Adithya, Angling. 2016. *Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO RESPONDEN	PEMAHAMAN AKUNTANSI (X1)					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	3	4	3	4	18
2	5	5	5	5	5	25
3	4	3	4	4	5	20
4	5	4	3	4	5	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	3	4	3	4	18
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	5	5	22
9	5	3	4	4	4	20
10	4	4	4	5	4	21
11	5	3	4	5	4	21
12	4	4	4	3	2	17
13	2	2	3	3	4	14
14	3	2	2	2	2	11
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	4	3	5	5	5	22
18	3	2	5	3	5	18
19	4	4	4	4	3	19
20	4	4	4	4	4	20
21	5	1	5	5	5	21
22	5	4	5	5	5	24
23	5	5	4	4	5	23
24	4	4	3	4	4	19
25	4	3	4	3	4	18
26	4	3	5	4	5	21
27	3	4	4	4	4	19
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	5	5	5	5	24
31	3	3	3	4	4	17
32	4	4	4	4	4	20
33	5	5	4	5	5	24
34	4	4	4	4	4	20
35	4	3	4	3	4	18
36	5	3	5	5	4	22
37	4	3	4	4	4	19
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	5	4	4	4	4	21
42	5	5	4	4	4	22
43	5	3	3	5	5	21
44	5	5	5	5	5	25



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	5	3	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	5	3	5	5	5	23
50	5	5	5	5	5	25
51	4	5	4	5	4	22
52	5	4	5	5	5	24
53	5	5	5	5	5	25
54	5	3	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	3	5	5	5	23
57	4	5	4	5	3	21
58	3	2	4	4	5	18
59	4	3	4	4	4	19
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	5	4	4	22
62	4	3	5	4	5	21
63	4	3	4	5	5	21
64	3	2	4	4	5	18
65	5	3	4	5	5	22
66	4	1	4	2	4	15
67	4	1	4	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	4	5	4	5	3	21
73	5	5	4	5	5	24
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	4	4	5	23
76	4	4	4	5	4	21
77	5	4	4	5	5	23
78	4	4	4	4	5	21
79	4	5	5	5	5	24
80	5	4	4	5	5	23
81	4	3	5	4	5	21
82	4	3	4	3	4	18
83	3	3	4	4	4	18
84	4	4	4	4	4	19
85	5	4	4	4	4	20
86	4	2	4	4	4	22
87	4	3	4	4	4	21
88	4	3	4	4	3	21
89	5	4	5	5	5	18
90	3	2	3	3	5	16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO RESPONDEN	KEPEMILIKAN NPWP (X2)					TOTAL X2
	X2.1	X2.1	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	3	3	21
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	4	4	4	22
4	4	4	5	4	4	21
5	4	3	3	3	3	16
6	4	4	4	3	3	18
7	4	5	5	5	4	23
8	4	5	5	4	3	21
9	4	5	5	4	3	21
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	5	5	5	25
12	4	3	4	4	3	18
13	5	5	5	5	5	25
14	3	4	4	4	3	18
15	4	4	4	4	5	21
16	4	3	3	3	3	16
17	5	4	3	3	3	18
18	3	4	3	3	4	17
19	5	5	5	5	5	25
20	3	4	4	4	4	19
21	5	5	4	5	4	23
22	4	4	4	4	3	19
23	4	5	3	3	3	18
24	4	3	3	3	3	16
25	4	4	4	3	3	18
26	3	3	3	4	4	17
27	4	4	4	4	3	19
28	3	4	4	3	4	18
29	4	3	3	3	3	16
30	4	5	4	4	4	21
31	5	5	5	5	4	24
32	4	5	5	4	4	22
33	5	5	5	5	5	25
34	3	3	3	3	3	15
35	4	4	4	3	4	19
36	5	5	5	5	5	25
37	4	3	3	3	4	17
38	5	5	5	5	5	25
39	4	3	5	5	5	22
40	4	4	4	4	4	20
41	5	4	4	4	5	22
42	5	5	5	3	5	23
43	4	5	5	5	5	24
44	5	5	5	5	5	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	5	5	5	5	4	24
46	4	4	4	4	4	20
47	4	5	4	2	4	19
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	5	5	25
51	3	4	3	3	4	17
52	5	5	5	4	4	23
53	5	4	3	4	5	21
54	5	5	5	5	4	24
55	4	3	5	5	5	22
56	3	4	5	4	5	21
57	3	4	3	3	4	17
58	4	4	5	5	4	22
59	4	4	4	5	5	22
60	4	4	5	5	5	23
61	4	3	3	4	4	18
62	4	3	3	3	3	16
63	4	4	5	5	5	23
64	5	5	4	5	5	24
65	4	4	4	4	4	20
66	2	4	4	2	5	17
67	4	4	4	4	4	20
68	3	3	3	3	3	15
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	5	5	4	24
72	3	4	3	3	4	17
73	5	5	5	5	5	25
74	4	5	5	5	5	24
75	5	5	5	5	3	23
76	4	5	5	5	4	23
77	5	3	4	5	5	22
78	5	4	5	4	5	23
79	5	4	5	5	4	23
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	4	5	4	23
82	4	5	4	4	4	21
83	4	4	4	4	3	19
84	5	5	5	4	4	23
85	5	5	5	4	4	23
86	4	4	4	4	3	19
87	5	3	4	4	4	20
88	3	4	4	3	4	18
89	5	5	5	5	3	23
90	4	4	5	4	3	20



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO RESPONDEN	PEMERIKSAAN PAJAK (X3)					TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	3	5	5	4	5	22
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	5	5	5	23
4	3	4	5	4	5	21
5	3	4	5	5	5	22
6	3	4	5	5	4	21
7	5	5	5	4	4	23
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	4	4	4	22
10	3	4	4	3	4	18
11	4	5	5	5	4	23
12	3	5	5	4	4	21
13	3	5	5	5	4	22
14	3	4	5	5	5	22
15	3	5	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	5	5	25
18	4	5	5	5	5	24
19	3	3	5	4	4	19
20	4	4	4	4	4	20
21	3	5	5	5	5	23
22	4	4	5	5	5	23
23	4	4	5	5	5	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	5	5	4	22
26	5	5	5	5	5	25
27	3	3	4	4	4	18
28	3	4	4	4	4	19
29	3	4	4	4	4	19
30	3	4	5	5	4	21
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	5	4	5	23
34	3	4	4	5	5	21
35	3	4	5	5	4	21
36	4	5	5	5	5	24
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	5	5	25
39	4	4	5	4	4	21
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	5	4	3	20
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	5	4	4	23
44	4	5	5	4	4	22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	4	4	4	3	4	19
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	5	5	5	23
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	5	5	5	23
50	5	5	5	5	5	25
51	5	3	5	5	4	22
52	5	5	3	4	4	21
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	3	4	19
55	4	4	5	4	4	21
56	4	4	5	5	5	23
57	4	3	5	5	4	21
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	5	21
60	5	5	4	4	4	22
61	4	5	5	4	4	22
62	5	5	5	5	5	25
63	5	4	4	4	5	22
64	5	5	5	4	4	23
65	4	4	4	4	5	21
66	2	4	5	4	2	17
67	2	4	4	3	4	17
68	3	3	3	3	3	15
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	3	4	4	4	4	19
72	4	3	5	5	4	21
73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	5	5	5	23
76	4	4	4	4	5	21
77	5	5	5	5	5	25
78	4	3	5	4	5	21
79	5	5	4	5	5	24
80	3	4	3	4	4	18
81	5	5	5	5	5	25
82	3	4	4	4	4	19
83	3	4	4	5	4	20
84	4	4	5	4	4	21
85	3	4	4	4	5	22
86	3	4	4	4	4	22
87	3	4	4	4	4	25
88	3	4	4	3	4	22
89	4	5	5	5	5	23
90	3	5	5	5	5	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO RESPONDEN	KEPATUHAN PAJAK (Y)					TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	3	4	5	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	4	4	21
5	4	4	5	3	5	21
6	5	4	4	4	4	21
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	4	20
9	5	4	2	5	5	21
10	5	4	5	4	4	22
11	5	5	5	5	4	24
12	3	4	5	5	5	22
13	3	4	5	4	3	19
14	4	4	5	5	3	21
15	4	3	5	5	5	22
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	4	4	23
18	4	4	5	4	5	22
19	4	4	4	5	5	22
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	4	4	5	23
22	4	4	4	5	4	21
23	5	5	4	4	5	23
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	4	4	4	21
26	5	5	4	5	4	23
27	4	5	5	4	5	23
28	4	4	3	4	4	19
29	4	4	5	5	5	23
30	5	5	5	5	5	25
31	5	4	4	4	4	21
32	4	4	4	4	4	20
33	5	5	5	5	5	25
34	3	4	4	4	4	19
35	5	4	4	4	4	21
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	3	4	4	4	4	19
42	5	5	5	5	5	25
43	5	5	5	5	5	25
44	5	5	5	5	5	25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	3	4	4	4	4	19
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	5	5	25
51	5	4	4	4	4	21
52	4	5	5	5	5	24
53	5	4	5	5	5	24
54	5	5	5	3	4	22
55	5	5	5	4	4	23
56	5	4	4	5	5	23
57	5	4	4	4	4	21
58	4	4	5	5	5	23
59	5	5	5	5	5	25
60	5	5	5	4	4	23
61	4	4	5	5	4	22
62	4	5	5	5	4	23
63	4	5	5	5	5	24
64	4	5	5	4	5	23
65	4	4	4	5	5	22
66	4	4	5	5	4	22
67	5	4	4	4	4	21
68	5	5	4	5	4	23
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	5	4	4	4	4	21
73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	4	4	5	23
76	4	4	5	5	4	22
77	5	5	5	5	5	25
78	3	5	5	4	4	21
79	4	5	5	5	5	24
80	4	4	4	5	4	21
81	5	5	4	5	5	24
82	5	4	5	4	5	23
83	4	3	4	4	4	23
84	5	5	4	4	5	25
85	4	4	3	4	4	23
86	4	4	4	4	4	22
87	4	5	4	5	4	25
88	5	4	4	4	5	24
89	5	5	5	5	5	23
90	4	5	4	5	4	22



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	90	11	25	20.76	2.939
NPWP	90	15	25	20.99	2.955
Pemeriksaan Pajak	90	15	25	21.61	2.186
Kepatuhan	90	19	25	22.51	1.909
Valid N (listwise)	90				

## HASIL UJI NORMALITAS

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48716972
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.055
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

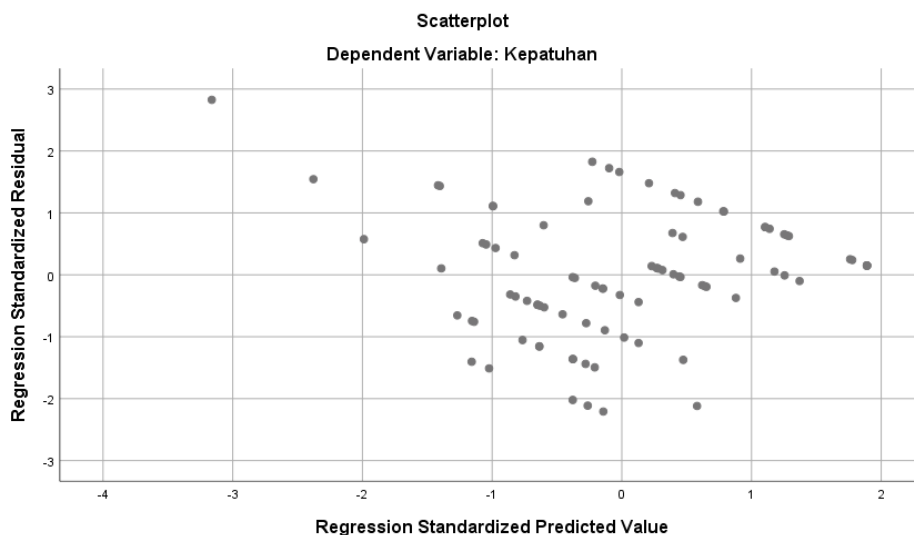
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL Uji MULTIKOLINIERITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	9.650	1.754		5.503	.000	
	Pemahaman Akuntansi	.136	.065	.209	2.084	.040	.702 1.425
	NPWP	.156	.059	.241	2.644	.010	.851 1.175
	Pemeriksaan Pajak	.314	.086	.359	3.666	.000	.735 1.361

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## HASIL Uji HETEROSKEDASTISITAS



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL Uji Parsial

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	9.650	1.754		5.503	.000
	Pemahaman Akuntansi	.136	.065	.209	2.084	.040
	NPWP	.156	.059	.241	2.644	.010
	Pemeriksaan Pajak	.314	.086	.359	3.666	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## HASIL Uji Simultan

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127.650	3	42.550	18.590	.000 <sup>b</sup>
	Residual	196.839	86	2.289		
	Total	324.489	89			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, NPWP, Pemahaman Akuntansi

## HASIL Uji Koefisien Determinasi

		Model Summary			Std. Error of the Estimate
Model		R	R Square	Adjusted R Square	
1		.627 <sup>a</sup>	.393	.372	1.513

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, NPWP, Pemahaman Akuntansi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL PEMAHAMAN AKUNTANSI ( $X_1$ )

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.485**	.524**	.609**	.429**	.751**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P2	Pearson Correlation	.485**	1	.346**	.583**	.233*	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.027	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P3	Pearson Correlation	.524**	.346**	1	.569**	.555**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P4	Pearson Correlation	.609**	.583**	.569**	1	.565**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P5	Pearson Correlation	.429**	.233*	.555**	.565**	1	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000	.027	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90
Total	Pearson Correlation	.751**	.710**	.714**	.845**	.650**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	5

## HASIL VALIDITAS DAN REALIBILITAS

### VARIABEL KEPEMILIKAN NPWP (X<sub>2</sub>)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.505**	.505**	.583**	.289**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.006	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P2	Pearson Correlation	.505**	1	.641**	.441**	.300**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.004	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P3	Pearson Correlation	.505**	.641**	1	.686**	.441**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P4	Pearson Correlation	.583**	.441**	.686**	1	.509**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P5	Pearson Correlation	.289**	.300**	.441**	.509**	1	.664**
	Sig. (2-tailed)	.006	.004	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90
Total	Pearson Correlation	.742**	.741**	.852**	.846**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL PEMERIKSAAN PAJAK (X<sub>3</sub>)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.436**	.223*	.310**	.368**	.651**
	Sig. (2-tailed)		.000	.034	.003	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P2	Pearson Correlation	.436**	1	.292**	.290**	.351**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.006	.001	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P3	Pearson Correlation	.223*	.292**	1	.624**	.353**	.602**
	Sig. (2-tailed)	.034	.005		.000	.001	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P4	Pearson Correlation	.310**	.290**	.624**	1	.548**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.003	.006	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P5	Pearson Correlation	.368**	.351**	.353**	.548**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90
Total	Pearson Correlation	.651**	.630**	.602**	.683**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.444**	.118	.166	.378**	.601**
	Sig. (2-tailed)		.000	.269	.119	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P2	Pearson Correlation	.444**	1	.443**	.311**	.433**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P3	Pearson Correlation	.118	.443**	1	.324**	.339**	.546**
	Sig. (2-tailed)	.269	.000		.002	.001	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P4	Pearson Correlation	.166	.311**	.324**	1	.416**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.119	.003	.002		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90
P5	Pearson Correlation	.378**	.433**	.339**	.416**	1	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90
Total	Pearson Correlation	.601**	.713**	.546**	.582**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	5

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**PUDJA RACHMAN DIRA**, kelahiran Pekanbaru, pada tanggal 22 Agustus 1997 Anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Ayahanda Abdul Rahim, SH, Mkn dan Ibunda Ir. Daryanti. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar di SD Islam As-shofa Pekanbaru dan lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 006 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Islam As-shofa Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Progran Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis melaksanakan Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru, kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru - Riau. Penulis melaksanakan penelitian di KPP MADYA Pekanbaru. Pada 03 Oktober 2019 penulis dinyatakan LULUS Ujian Oral Comprehensive dan Munaqasah dengan Judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru” dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).